

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang Korea yang pecah pada tahun 1950—1953 menimbulkan dampak yang signifikan dan berkepanjangan. Korea terpisah menjadi dua negara dengan ideologi dan sistem ketatanegaraan yang saling bertolak belakang. Korea Utara dengan komunismenya dan Korea Selatan dengan liberalismenya. Berbeda halnya dengan Jerman yang telah menyatu kembali begitu Uni Soviet runtuh. Kedua Korea masih bersitegang baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial meskipun perang dingin telah berakhir. Hal tersebut ditandai dengan adanya daerah DMZ (demilitarizedzone) yang membelah kedua Korea. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi terus mengalami pasang surut. Salah satunya adalah reunifikasi.

Reunifikasi menjadi topik utama yang dibahas, bahkan saat kedua Korea pertama kali mengadakan pembicaraan kembali pada tahun 1971. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran pada awal upaya reunifikasi ini. Kedua Korea juga telah menunjukkan itikad baik dengan membentuk Komite bersama Selatan-Utara. Komite tersebut telah menyepakati prinsip-prinsip dasar reunifikasi Korea. Pertama, independen. Kedua, dengan cara damai. Ketiga, menjunjung persatuan nasional di atas perbedaan ideologi dan sistem.

Pada era setelahnya, seperti pada tahun 1980-an, upaya reunifikasi juga terus dipromosikan, apalagi pada saat itu Korea Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade. Secara tidak langsung, mereka berkewajiban merangkul negara-negara Blok Soviet untuk turut bergabung. Namun, upaya reunifikasi menjadi jauh lebih rumit sejak Korea Utara mengumumkan akan menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1993.

Perjanjian Jenewa tahun 1994 antara Amerika Serikat dan Korea Utara menyebabkan pembekuan fasilitas nuklir plutonium Korea Utara selama beberapa tahun. Namun, perjanjian tersebut akhirnya dibatalkan karena kecurigaan meningkatnya pengayaan uranium.

Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

Korea Utara memulai kembali fasilitas nuklir plutoniumnya pada tahun 2002. Oleh sebab itu, pada tahun 2003, pembicaraan Enam Pihak diluncurkan, melibatkan Korea Selatan dan Utara serta AS, Cina, Jepang, dan Rusia. Namun, lagi-lagi gagal membuahkan hasil. Bahkan selama proses itu, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006 dan uji coba kedua pada tahun 2009. Pyongyang pun mempublikasikan terkait fasilitas nuklirnya di Yongbyon pada tahun 2010.

Korea Utara mengadopsi apa yang disebut kebijakan "Byungjin" pada tanggal 31 Maret 2013, yakni mengejar pembangunan ekonomi dan persenjataan nuklir secara bersamaan. Keesokan harinya, Korea Utara memberlakukan "undang-undang yang mengonsolidasikan posisi negara bersenjata nuklir untuk pertahanan diri".

Pada tahun 2016, Korea Utara lebih lanjut melakukan uji coba nuklir keempat pada bulan Januari dan yang kelima pada bulan September. Pada tahun 2017 juga, ketegangan terus meningkat ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenam dan peluncuran rudal balistik kelas ICBM.

Namun, 2018 merupakan menyaksikan titik balik dalam sejarah masalah nuklir Korea Utara. Pemerintah ROK telah menekankan pentingnya penyelesaian damai masalah nuklir Korea Utara dalam banyak kesempatan, termasuk "Inisiatif Berlin" Presiden Moon pada Juli 2017. Pemerintah ROK juga telah mengusulkan Pyongyang untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018. Akibatnya, Korea Utara berpartisipasi dalam Pertandingan Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade PyeongChang 2018 pada bulan Februari dan Maret.

Pada paruh pertama tahun 2018, serangkaian pencapaian bersejarah telah ditetapkan: Dua KTT antar-Korea masing-masing pada 27 April dan 26 Mei diikuti oleh KTT AS-Korea Utara yang pertama pada 12 Juni di Singapura. Peristiwa ini telah mengubah lanskap politik di Semenanjung Korea, melucuti sisa-sisa Perang Dingin di Semenanjung Korea dan membuka jalan bagi penyelesaian diplomatik masalah nuklir Korea Utara. Yang terpenting, para pemimpin tertinggi kedua Korea dan AS menyatakan komitmen tegas dan teguh mereka untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea, yang ditetapkan pada Deklarasi Panmunjom 27 April dan Pernyataan Bersama AS-Korea Utara pada KTT Singapura pada 12 Juni. Hal ini mengarah pada Pertemuan Puncak antar-Korea Pyongyang pada 18-20 September di mana Korea Utara berjanji

Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk denuklirisasi dalam Deklarasi Bersama Pyongyang. Korea Utara mengumumkan akan membongkar secara permanen situs uji coba mesin rudal Dongchang-ri dan meluncurkan platform di bawah pengawasan para ahli dari negara terkait, dan menunjukkan kesediaannya untuk mengambil tindakan tambahan, seperti pembongkaran permanen fasilitas nuklir di Yongbyon. Selama kunjungan Menteri Luar Negeri AS Pompeo ke Korea Utara pada 7 Oktober, Korea Utara dan AS mencapai kesepakatan untuk mengadakan KTT AS-Korea Utara yang kedua sesegera mungkin.

Upaya ini mengarah pada KTT AS-Korea Utara kedua di Hanoi dari 27 hingga 28 Februari pada 2019. Sangat disayangkan bahwa Korea Utara dan AS tidak dapat mencapai kesepakatan di KTT tersebut. Pada tanggal 30 Juni, tiga pemimpin kedua Korea dan AS bertemu untuk pertama kalinya dalam sejarah di Panmunjom dan para pemimpin AS dan Korea Utara setuju untuk melanjutkan negosiasi tingkat kerja AS-Korea Utara. Akibatnya, negosiasi tingkat kerja berlangsung di Stockholm pada 4-5 Oktober. Namun, itu berakhir tanpa kesepakatan atau rencana tindak lanjut. Sejak itu, belum ada kemajuan nyata dalam dialog AS-Korea Utara.

Situasi menjadi semakin memburuk setelah pada 16 Juni 2020, Pyongyang marah besar terhadap kelompok pembelot Korea Utara yang berbasis di Korea Selatan. Mereka secara rutin mengirim selebaran ke seberang wilayah perbatasan. Imbasnya, Korea Utara meledakkan kantor penghubung kedua negara (Utara-Selatan) di Kaesong. Kantor yang dibangun pada 2018 tersebut sejatinya untuk memperlancar komunikasi kedua Korea.

Pemerintah ROK, melalui aliansi ROK-AS dan komunitas internasional, akan melanjutkan upayanya untuk mencapai denuklirisasi lengkap dan pembentukan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui dialog. Berdasarkan Deklarasi Panmunjom 27 April, Pernyataan Bersama AS-Korea Utara 12 Juni, Deklarasi Bersama Pyongyang 19 September, dan perjanjian masa lalu lainnya dengan Korea Utara, pemerintah ROK akan fokus pada promosi AS-Korea Utara serta dialog antar-Korea, yang akan berkontribusi pada kemajuan dalam denuklirisasi.

Pengembangan senjata nuklir, menjadi hambatan utama reunifikasi Korea selain persoalan ideologis, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pengembangan nuklir telah dibentuk oleh pengalaman pahit peristiwa Perang Korea dan Perang Dingin. Pengalaman

Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

ini menjadi alasan kuat bagi Korea Utara untuk selalu mewaspadaikan ancaman bagi keamanan nasionalnya (Pinkston, 2006). Ideologi kemandirian Juche yang dicetuskan oleh pemimpin Korea Utara telah menjadi pedoman ideologi kebijakan keamanan dan politik luar negeri. Rekonseptualisasi Juche secara sederhana dipahami sebagai bentuk integrasi (mobilisasi atau penyatuan) termasuk didalamnya mobilisasi massa internal dalam upaya mendukung kebijakan nuklir serta perlawanan (resistensi) secara eksternal terhadap ancaman keamanan. (Park, 2001).

Runtuhnya Uni Soviet dan terintegrasinya Cina dalam perekonomian global membuat Korea Utara mengalami kesulitan untuk menjalin aliansi dengan negara lain. Ketidakmampuan ekonomi menjadikan Korea Utara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk meningkatkan kekuatan militernya. Bagi Korea Utara, mempertahankan keamanan nasional lebih penting daripada kesejahteraan ekonomi. Korea Utara menginvestasikan banyak anggaran untuk pembangunan nuklir sebagai kompensasi dari menurunnya tingkat kemampuan militer konvensional apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan (Tang, 2009).

Di sisi lain, sanksi ekonomi diberikan sebagai alat untuk menekan program nuklir Korea Utara. Selama ini, sanksi tersebut selalu diupayakan oleh sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat dalam bentuk pembatasan ekspor perdagangan, pembekuan aset kekayaan, serta kebijakan isolasi ekonomi dan perdagangan yang akhirnya semakin membuat Korea Utara kesulitan dalam kegiatan ekonomi internasional. Tiongkok sendiri sangat berhati-hati dalam upaya mendukung reunifikasi dua Korea. Dilihat dari sisi kepentingan keamanan, runtuhnya Korea Utara juga bisa menjadikan kepentingan strategis Amerika Serikat untuk 'mengawasi' Tiongkok di kawasan Asia Timur menjadi lebih mudah.

Berdasarkan paparan di atas, upaya reunifikasi kedua Korea harus melibatkan pula kebijakan denuklirisasi. Di samping itu, perlu juga memperhatikan kompleksitas keamanan kawasan di Asia Timur. Oleh sebab itu, topik penelitian ini sangat penting untuk ditindaklanjuti.

1.2 Rumusan Masalah:

Reunifikasi kedua Korea terus mengalami pasang surut pasca denuklirisasi. Kedua pihak memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda terhadap denuklirisasi. Hal itu akan berbahaya terhadap keamanan nasional jika keduanya tidak mencapai titik temu. Berdasarkan hal tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi:

Bagaimana pengaruh reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pasca denuklirisasi terhadap keamanan nasional?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan pasca denuklirisasi terhadap keamanan nasional.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini berupa:

- a. Kajian ilmiah berupa analisis terkait pengaruh denuklirisasi terhadap upaya reunifikasi
- b. Referensi penelitian lainnya yang terkait dengan denuklirisasi dan unifikasi Korea.
- c. Sumbangan kecil bagi upaya perdamaian kedua Korea.

1.5 Kerangka Konseptual

1. National security

National security menjadi alasan macetnya kesepakatan tentang denuklirisasi. RRT memandang jika denuklirisasi terlaksana, national security mereka terancam. Sementara itu, Amerika Serikat juga memandang denuklirisasi tidak dilakukan, national security mereka terancam. Kadang-kadang negara mengabaikan faktor lain demi mempertahankan 'national security' seolah-olah seperti hukum diatas hukum. Penerapan national security yang berlebihan dapat

Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

membawa dampak yang buruk bagi keamanan dan perdamaian itu sendiri. Apalagi jika national security ini hanya dijadikan kedok untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari negara lain.

Intinya, keamanan nasional, baik dari segi sumber daya dan organisasi, tetap disediakan oleh negara. Kewenangan dan kewajiban negara untuk menghasilkan keamanan ini menjadikan pertahanan negara sebagai salah satu elemen penting dari sektor publik. Keamanan nasional biasanya digambarkan sebagai pertahanan perbatasan negara dari ancaman eksternal, khususnya di laut. Konsep keamanan nasional mewujudkan penerapan politik dan ilmiahnya. Nilai yang ditempatkan negara pada keamanan sangat bervariasi karena beberapa negara lebih tertarik untuk memperoleh lebih banyak nilai dengan melebih-lebihkan atau meremehkan keamanan sebagai "tidak adanya ancaman terhadap nilai yang diperoleh". Negara mungkin melebih-lebihkan atau meremehkan kerugian yang dirasakan untuk akuisisi mereka.¹

Dalam konteks kedua belah pihak Korea, national security dilipat gandakan untuk mempertahankan integrasi masing-masing, yang masih rentan bahkan bertahun-tahun setelah Perang Korea berakhir. Strategi keamanan nasional Korea Selatan telah terjadi dengan harapan untuk melanjutkan upayanya untuk meningkatkan rekonsiliasi antarKorea. Hubungan antar-Korea telah memburuk dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir setelah serangkaian provokasi dari Utara, termasuk pembongkaran kantor penghubung dan ancaman militer. Korea Utara masih mempertahankan ancaman dan serangan misil ke Korea Selatan dan Amerika, dengan hasil yang kurang substansial. Namun cara ini menjadi salah satu bentuk pertahanan nasional mereka.²

2. Kerjasama Keamanan

Kerja sama telah menjadi topik diskusi yang populer dalam Hubungan Internasional. Kajian ini sering dikaitkan dengan Paradigma Liberalisme. Di sisi lain, Paradigma Realisme biasanya dikaitkan dengan studi tentang konflik dan perang antarnegara. Dalam ranah internasional, tidak ada monopoli kekerasan yang sah dan sebagai konsekuensinya, setiap negara harus menjaga

¹ How Should National Security and Human Security Relate to Each Other, by Riccardo Trobbiani. *EInternational Relations*

² Seoul Doubles Down on North Korea Gambit With National Security Reshuffle, by Tae-jun Kang, *The Diplomat*
Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

keamanannya sendiri. Karena alasan ini, tujuan utama negara adalah memaksimalkan keamanannya sendiri. Namun, banyak tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, seperti penyuplaian senjata dan pengembangan teknologi militer baru.

Gencatan senjata antara kedua Korea telah berlangsung dengan konstan dan tidak kunjung berakhir. Perjanjian Gencatan Senjata Korea mengakhiri permusuhan yang menewaskan 2,5 juta orang pada 27 Juli 1953, bahwa gencatan senjata tidak pernah memberi jalan kepada perjanjian damai. Komandan militer dari China dan Korea Utara menandatangani perjanjian di satu sisi, dengan penandatanganan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa pimpinan AS atas nama komunitas internasional. Korea Selatan bukan penandatanganan. Gencatan senjata hanya dimaksudkan sebagai tindakan sementara.

Keamanan nasional juga kadang memiliki standar ganda yang menguntungkan otoritas teratas. Di bawah kebijakan standar ganda dalam ruang politik global, satu-satunya jaminan keamanan nasional bagi Korea Utara dan Selatan mungkin jelas dan mengungkapkan artikulasi kepentingan nasional umum mereka sendiri untuk memastikannya, dan pelatihan staf yang kompeten dan organisasi badan informasi yang mampu berdiri dengan jelas. Ini juga berhubungan langsung dengan ideology antikomunisme Korea Selatan yang bertolak belakang dengan Korea Utara, dan terus melebarkan divisi dan keamanan nasional antar dua negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian akan dilakukan dan dibagi dalam lima bab, yang akan mencakupi sebagai berikut:

a.) BAB I PENDAHULUAN: akan menjelaskan sejarah bagaimana Korea Utara dan Korea Selatan telah berlangsung sejak meletusnya Perang Korea di tahun 1950. Diangkat topik denuklirisasi dan bagaimana peran aktif Korea Utara dalam penggunaan senjata nuklir mempengaruhi prospek reunifikasi dari Korea Utara dan Korea Selatan. Pengerucutan topik ini akan berfokus pada periode di tahun 2017-2020, dimana dalam 4 tahun terakhir ini, Korea Utara semakin gencar melakukan kerja sama dengan China dan Rusia untuk kepentingan nasional dan luar negeri mereka, yang bertolak belakang dengan Korea Selatan yang beraliansi dengan Amerika Serikat dalam sector ekonomi, politik dan keamanan. Diangkat beberapa teori yang

Shafiya Salsabila Rusti Nuridho, 2022

7

berkoresponden dengan topik ini, seperti *national security* dan kerjasama keamanan internasional.

b.) BAB II KAJIAN LITERATUR: akan membahas lebih lanjut penelitian melalui kajian literature yang berkoresponden. Acuan dasar dari topik ini adalah Joint Declaration of Korean Peninsula Denuclearization, yang membahas lebih lanjut persetujuan kedua negara dalam proses denuklirisasi. Paper-paper akademik yang lain dan berkaitan dengan kedua Korea dan negara-negara yang beraliansi langsung dengan mereka akan ditelaah lebih lanjut.

c.) BAB III METODE PENELITIAN: akan dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta waktu lokasi penelitian.

d.) BAB IV PEMBAHASAN: akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis tentang perkembangan *national security* kedua negara Korea, hubungan aliansi dengan Amerika dan Tiongkok secara respektif, dan dampak yang jelas dalam kawasan *national security* kedua negara secara langsung.

e.) BAB V PENUTUP: Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada di rumusan masalah, serta saran atau masukan terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.